



JUMLAH PENERIMA RESMI DITETAPKAN WALIKOTA Tambahkan Kategori KMS Dibatalkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Jumlah warga miskin yang menerima Kartu Menuju Sehat (KMS) tahun 2018 dipastikan berkurang dibandingkan tahun 2017. Sebanyak 17.253 kepala keluarga penerima KMS 2018 telah ditetapkan Walikota Yogyakarta. Adapun rencana tambahan kategori kemiskinan akhirnya dibatalkan. "Data penerima kartu menuju sejahtera sudah ditandatangani Pak Wali. Jumlah penerimanya sama seperti yang kami ajukan yakni 17.253 kepala keluarga," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Bejo Suwarno, Senin (8/1).

Bejo menyatakan, jumlah penerima KMS 2018 berkurang dibandingkan penerima KMS tahun 2017 yang mencapai 18.651 kepala keluarga (KK). Jika dihitung dari jumlah KK, ada penurunan sekitar 7,49 persen atau sekitar 1.398 KK. Sedangkan dihitung berdasarkan jumlah jiwa penerima KMS berkurang sekitar 8,5 persen dibandingkan tahun 2018.

Menurutnya, rencana penambahan kategori KMS belum diterapkan pada tahun 2018. Penambahan kategori masih akan dikaji dan menunggu evaluasi dengan legislatif. Rencananya kategori KMS terdiri atas 3 kategori, yakni fakir miskin, miskin dan rentan miskin, dan akan ditambah kategori tak layak menerima tapi belum mandiri jika dilepas dari program KMS. "Kategori penerima kartu menuju sejahtera juga masih sama. Ada tiga kategori fakir miskin, miskin dan rentan miskin," imbuhnya.

Sejumlah program perlindungan sosial yang bisa diakses penerima KMS di antaranya jaminan kesehatan, akses jalur peserta didik baru, jaminan pendidikan daerah dan santunan kematian.

Secara terpisah anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Dwi Budi Utomo meminta data KMS 2018 dapat digunakan sebagai basis data penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Terutama pengentasan kemiskinan sesuai Perda Nomor 23 Tahun 2009 oleh seluruh organisasi perangkat daerah. "Pemanfaatan data penduduk miskin penerima KMS selama ini hanya untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan saja. Seharusnya data bisa dimanfaatkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Sudah diatur jelas dalam perda agar pengentasan kemiskinan bisa bersinergi," tandas Dwi Budi. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005